

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Asia Timur saat ini merupakan kawasan yang paling banyak mendapat sorotan dari dunia internasional. Kebangkitan negara-negara di Asia Timur mulai mengambil perhatian negara-negara besar untuk ikut berperan aktif didalam kawasan tersebut. Kebangkitan Cina baik dari segi ekonomi dan militernya, pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan tindakan agresif Cina dalam kasus Laut Cina Selatan memberikan reaksi ke negara-negara besar untuk campur tangan di dalam kawasan tersebut. Namun perhatian negara besar bukan hanya datang karena isu-isu terkini tetapi melainkan juga karena isu-isu klasik yang hingga sampai saat ini masih belum terselesaikan. Salah satu permasalahan klasik tersebut adalah isu mengenai Krisis Semenanjung Korea yang terjadi diantara dua negara Korea tersebut.

Konflik berkepanjangan di Semenanjung Korea pada dasarnya dipicu oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama masa Perang Dingin yang berusaha melakukan penyebaran terhadap dua paham yang berbeda yaitu Amerika Serikat dengan paham demokrasi dan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Masuknya Amerika Serikat ke wilayah Korea Selatan dan Uni Soviet ke wilayah Korea Utara menimbulkan perbedaan terhadap kedua negara Korea tersebut. Berdirinya dua sistem pemerintahan yang berbeda, sikap saling curiga diantara kedua Korea, serta hubungan aliansi masing-masing dengan pihak

sekutunya adalah akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara kedua negara *superpower* (Amerika Serikat dan Uni Soviet).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat menganggap bahwa Semenanjung Korea berada di luar parameter pertahanannya dan yang menjadi prioritas Amerika Serikat di kawasan Asia Timur adalah Jepang. Namun, Pecahnya Perang Korea pada bulan Juni 1950, akibat adanya invasi Korea Utara ke Korea Selatan, mengakibatkan Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan keamanannya di Semenanjung Korea. Perang Korea melibatkan kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan Cina dipihak Korut dan Amerika Serikat beserta pasukan gabungan dari PBB di pihak Korsel. Perang Korea berakhir pada tanggal 27 Juli 1953 melalui suatu perumusan gencatan senjata yang saling disetujui oleh pihak yang terlibat.

Dalam persetujuan ini menghasilkan pembentukan suatu garis demarkasi militer dan suatu Zona Bebas Militer (DMZ-*Demilitarized Zone*) yaitu suatu daerah yang dikosongkan dari pasukan militer terhadap pihak-pihak yang berhadapan.¹ Namun perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat bukan merupakan perjanjian yang permanen dan bukan merupakan *Peace Treaty* (perjanjian damai resmi) dari permasalahan tersebut. Perjanjian gencatan senjata lebih mengarah kepada penyelesaian militer dan bukan penyelesaian mendasar dari masalah tersebut. Perilaku agresif yang dilakukan oleh Korea Utara tetap menjadi ancaman utama terhadap usaha perdamaian di Semenanjung Korea. Oleh karena itu perdamaian di Semenanjung Korea bersifat

¹ William L. Bradley dan Mohtar Mas'ood, "*Dokumen-Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*", Jakarta, Yayasan Obor Asia, 1991, hal. 120-127.

tidak stabil selama pihak Korea Utara tidak ada kemauan untuk duduk bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada era 1990-an kebijakan Amerika Serikat di Semenanjung Korea lebih didominasi oleh perhatian terhadap sikap keras dari pihak Korea Utara dan ketidak konsistennya terhadap apa yang telah disepakati. Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pada masa ini juga sempat mengalami ketegangan akibat adanya penyusupan kapal Korea Utara ke Korea Selatan dan adanya gelombang pembelotan Korea Utara ke Korea Selatan. Namun sumber ketegangan yang terus menjadi perhatian utama di Semenanjung Korea adalah program pengembangan senjata nuklir dan yang dilakukan oleh Korea Utara. Kasus nuklir Korea Utara menarik perhatian dunia internasional ketika pada tanggal 12 Maret 1993, Korea Utara mengumumkan keinginannya untuk mundur dari perjanjian *Non Proliferation Treaty*² (NPT) pada tanggal 12 Juni 1993, dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Korea Utara mengajukan surat pengunduran diri dari NPT kepada Dewan Keamanan PBB dan memberikan dua alasan dari pengundurannya³, yaitu *pertama* karena Amerika Serikat dan Korea Selatan mengaktifkan kembali *Operation Tim*

² NPT (*Non-Proliferation Treaty*) ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968. NPT dibuat untuk mencegah perluasan dari senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir hanya dibatasi kepada lima negara nuklir yang juga merupakan negara anggota tetap dewan keamanan PBB, yaitu, Cina, AS, Perancis, Inggris dan Rusia. Yang dikenal dengan istilah *nuclear states weapon*. Bagi negara-negara yang tergolong kedalam *non-nuclear states weapon* dan sudah meratifikasi NPT, diharapkan tidak menerima senjata nuklir dari negara-negara nuklir. NPT memiliki aturan yang melarang bagi proses pengembangan, produksi dan penggunaan dari senjata biologi dan senjata kimia. Namun NPT tidak mengatur pelarangan bagi proliferasi dari senjata biologi, kimia dan nuklir. Frank Barnaby, "*How To Build a Nuclear Bomb and Other Weapons of Mass Destruction*", (London : Granta Books, 2003), hal 21.

³ Young Jeh Kim, "*North Korea's Nuclear Program and It's impact on Neighbouring Countries*", Korea and World Affairs, Vol 17, No.3, Research Center for Peace and Unification Korea, 1993, hal 488.

Spirit pada tahun 1993 tanpa memperhatikan protes Korea Utara. *Kedua*, permintaan inspeksi spesial *International Atomic Energy Agency* (IAEA) terhadap dua fasilitas di Yongbyon, yang dicurigai merupakan fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir. Inspeksi spesial IAEA ini ditolak Korea Utara dengan alasan bahwa fasilitas di Yongbyon tersebut merupakan fasilitas militer akan tetapi tidak berhubungan dengan pengembangan senjata nuklir dan permintaan tersebut berada di luar yurisdiksi IAEA.

Korea Utara merupakan negara anggota NPT pertama yang menggunakan hak mundur, sesuai dengan pasal X dari NPT tersebut⁴. Tindakan tersebut memang diperbolehkan oleh traktat, dengan memberitahukan tiga bulan sebelumnya. Pengunduran diri Korea Utara dari NPT dinilai sangat berbahaya oleh Amerika Serikat karena dapat menjadi acuan yang buruk yang mungkin akan diikuti oleh negara anggota lainnya dan dapat mengancam kelangsungan rezim non poliferasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat sejak 1968. Rezim non poliferasi nuklir yang dipimpin oleh Amerika Serikat mempunyai tiga tujuan, yaitu⁵ (1) mencegah poliferasi senjata nuklir lebih luas; (2) membantu perkembangan kerjasama nuklir untuk tujuan damai atau sipil dibawah

⁴ "TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS", ARTICLE X, diakses dari www.iaea.org

Article X :

- Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

- Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty

⁵ Hyun Chung, "North Korea's Nuclear Ambitions and The Current Nuclear Non-Proliferation regime", *The Korean Journal of International Studies*, 1994, vol 25, no.3 hal 237.

mekanisme pengamanan (*safeguard mechanism*); (3) menghentikan perlombaan senjata nuklir dengan berpedoman pada perlucutan menyeluruh.

Sejalan dengan perkembangannya fenomena poliferasi nuklir di negara-negara berkembang telah menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Amerika Serikat. Persepsi ancaman ini khususnya datang dari negara-negara yang dikategorikan oleh Amerika Serikat sebagai "*rogue states*" (negara-negara bandel). Dalam hal ini Korea Utara pun juga dianggap sebagai *rogue states* oleh Amerika Serikat bersamaan dengan Irak, Iran dan Libya. Justifikasi ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa (1) negara-negara tersebut berpotensi untuk meluncurkan persenjataan nuklir atau menggunakan senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction* atau WMD) dengan mempergunakan rudal balistik jarak jauh (*long-range ballistic missiles*); dan (2) negara-negara tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan irasional untuk menyerang wilayah Amerika Serikat, yang tidak akan dapat diatasi dengan ancaman serangan balasan.⁶

Pengertian *rogue states* sendiri mengacu kepada negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki kekuatan militer dan kapabilitas senjata pemusnah massal yang cukup besar dan cenderung bermusuhan dengan AS. Negara-negara yang dikategorikan *rogue states* tersebut merupakan negara yang secara terang-terangan bertentangan dan memiliki perbedaan kepentingan dengan AS. Ancaman yang ditimbulkan oleh kapabilitas nuklir *rogue states* semakin meningkat dengan disertainya upaya pengembangan rudal balistik oleh negara-negara tersebut.

⁶ John Pike, "*The Rogue States: No Clear and Present Danger*", Journal of Federation of American Scientist (F.A.S), Vol 53 No.4. 1996.

Kemampuan yang dimiliki rudal balistik yang dapat mencapai jarak hingga ribuan kilometer, rudal balistik dapat dipergunakan sebagai media pengangkut senjata pemusnah massal seperti nuklir. Dengan begitu, kapabilitas rudal balistik telah memberikan kemampuan lebih bagi suatu negara untuk dapat menjangkau wilayah lawan secara lebih luas, tidak hanya di daratan tetapi juga di lautan. Kapabilitas rudal balistik ini akan memungkinkan *rogue states* untuk menyerang negara lain dengan mudah.

Pasca tragedi pengemboman WTC 9/11 dan seiring dengan perkembangan senjata nuklir di *rogue state*, Presiden AS George W. Bush semakin menaruh perhatian penuh terhadap pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh negara-negara yang dianggap sebagai musuh oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat melihat program pengembangan senjata nuklir ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyebaran senjata nuklir secara lebih luas ke kelompok aktor non negara seperti organisasi terorisme.

Selain itu, keluarnya Korea Utara dari NPT, masuknya Korea Utara kedalam kelompok *rogue state* dan isu pengembangan senjata nuklir yang terus digencarkan oleh Amerika Serikat, membuat posisi Korea Utara merasa tidak aman dalam sistem internasional. Ketidakamanan posisi Korea Utara dalam sistem internasional dapat memberikan dampak bagi Korea Utara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dalam mencapai kepentingan nasionalnya di kancah internasional.

Hal tersebut menjadikan Korea Utara harus mencari cara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dalam mencapai kepentingan nasional

negaranya. Dalam hal ini, pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus meningkat digunakan oleh Korea Utara sebagai sebuah bentuk diplomasi internasional dalam mencapai posisi yang kuat untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Doktrin mengenai perang nuklir dan akuisisi sistem persenjataan telah menjadi alternatif pilihan strategi dalam keamanan negara⁷. Selain itu, pengembangan senjata nuklir dianggap oleh suatu negara sebagai strategi militer dimana penggunaan senjata nuklir dapat menghilangkan esensi moral dan sangat berbahaya bagi keamanan dunia namun dapat memberikan dan meningkatkan kemampuan yang signifikan di dalam bidang militer, terutama untuk keamanan negara.

Pengembangan senjata nuklir juga memberikan dampak pada perubahan konstelasi antara negara besar dan negara yang lebih kecil terlihat pada pola interaksi yang selama ini bersifat stagnan. Dalam hal ini, konteks hubungan yang biasanya negara kecil selalu berlandung dibalik kekuatan negara besar, namun senjata nuklir mulai dilihat oleh negara kecil sebagai alternatif dalam mencapai keamanan dan terlepas dari ikatan negara besar.

Dilihat dari perkembangannya, Korea Utara merupakan negara yang memiliki peningkatan yang paling baik dalam hal pengembangan senjata nuklir. Dilihat dari peluncuran senjata nuklir Korea Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 1993, Korea Utara melakukan uji coba misil

⁷ Ian Clark, *"Nuclear Past, Nuclear Present: Hiroshima, Nagasaki and Contemporary Strategy"*, USA: Westview Press Inc, 1993, hal 11.

jenis Rodong dengan estimasi jarak 1.300 km dan pada Agustus 1998 jenis Daepodong-I dan Daepodong – II dengan estimasi jarak sekitar 4000-6000 km.⁸

Setelah melakukan pengembangan senjata nuklir kembali yang dimulai tahun 2002, Korea Utara untuk pertama kalinya melakukan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara pada 5 Juli 2006 dengan menembakkan tujuh misilnya termasuk diantaranya Taepodong – II. Peluncuran rudal di Semenanjung Korea membuat beberapa negara merasa khawatir seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Kemudian disusul kembali pada 25 Mei 2007 Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklirnya yang dilepaskan dari kapal anti rudal di Lepas Pantai Timur Korea Utara.

Uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara digunakan sebagai strategi dalam menghadapi interaksi konflik yang terus terjadi diantara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dalam hal ini Korea Utara melakukan gunboat diplomasi sebagai strategi tersebut. Gunboat diplomacy merupakan sebuah diplomasi koersif dengan mempertunjukkan kekuatan. Pertunjukan kekuatan dapat termasuk latihan militer di area atau wilayah yang sensitif, manuver angkatan laut atau uji coba tes misil yang dianggap provokatif. Gunboat diplomacy ini digunakan oleh Korea Utara sebagai diplomasi koersif dalam menghadapi Amerika Serikat dengan tujuan mencapai kepentingan baik itu ekonomi ataupun politiknya sehingga memberikan keunggulan pada negara pemiliknya dan dapat memberikan dominasi yang lebih besar diantara negara disekitarnya.

⁸ LIM Soo-Ho, “ *Responding to The North Korean Nuclear Threat*”, Seri Quarterly, April 2011, hal 2.

Uji coba nuklir Korea Utara digunakan sebagai bentuk diplomasi koersif yang memberikan tekanan pada Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mengalami perubahan sikap yang lebih lunak dalam interaksi dengan Korea Utara. Hal tersebut terlihat dengan adanya kesepakatan bersama antara Korea Utara dan Amerika Serikat di tahun 2008.

Dalam penelitian ini akan mengambil rentang waktu yang dimulai pada tahun 2006, dimana ditahun 2006 uji coba senjata Nuklir Korea Utara mulai dilakukan kembali setelah terakhir pada tahun 1994. Penelitian ini akan berhenti pada tahun 2008 dimana pada tahun tersebut telah dicapainya kesepakatan bersama antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat bahwa uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara di tahun 2006 dapat memberikan perubahan status quo bagi Korea Utara.

I.2 Rumusan Permasalahan

Interaksi konflik yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Korea Utara dimulai ketika Korea Utara melakukan pengunduran diri dari NPT dan juga ketika Amerika Serikat memasukkan Korea Utara kedalam kelompok *rogue state* yang juga di anggap sebagai musuh Amerika Serikat. Pernyataan Amerika Serikat, dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Korea Utara sehingga Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir Korea Utara sebagai bentuk diplomasi internasional dalam menyuarakan kepentingan nasionalnya. Uji coba senjata nuklir Korea Utara digunakan oleh Korea Utara sebagai sebuah bentuk diplomasi dalam menghadapi interaksi konflik yang terjadi diantara Amerika Serikat dan

Korea Utara. Dalam hal ini Korea Utara melakukan gunboat diplomacy melalui senjata nuklir yang dimilikinya. Gunboat diplomacy ini akan dilihat mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan secara spesifik penelitian ini akan mencoba mengangkat hal penting untuk diteliti yaitu :

Bagaimana gunboat diplomacy Korea Utara dalam menghadapi Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir periode 2006-2008?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik yang terjadi diantara Korea Utara dengan Amerika Serikat dan tawar – menawar yang dilakukan antara kedua negara tersebut melalui penggunaan senjata nuklir Korea Utara yang digunakan sebagai gunboat diplomacy Korea Utara dalam menghadapi Amerika Serikat melalui uji coba senjata nuklir yang dimilikinya.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana interaksi konflik yang terjadi diantara Korea Utara dan Amerika Serikat dan penggunaan gunboat diplomacy oleh Korea Utara melalui senjata nuklir.
2. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan mengenai gunboat diplomacy yang dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan bagi para pembaca dalam melengkapi karya tulisnya.

I.5 Tinjauan Pustaka

Konflik antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang terjadi sejak Perang Korea, terus berlanjut hingga saat ini. Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat, sehingga interaksi konflik di dua negara tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Dalam menghadapi Amerika Serikat, Korea Utara menggunakan gunboat diplomacy sebagai strategi dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan senjata nuklir yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan interaksi konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara dan penggunaan gunboat diplomacy yang dilakukan oleh Korea Utara.

- **Michael O’Hanlon dan Mike Mochizuki, *Crisis on The Korean Peninsula : How to Deal With a Nuclear North Korea*, A Brookings Institution Book, 2003.**

Dalam buku “*Crisis on The Korean Peninsula : How to Deal With a Nuclear North Korea*” yang ditulis oleh Michael O’Hanlon dan Mike Mochizuki menjelaskan posisi tawar-menawar yang mendasar antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Walaupun kesepakatan dapat dinegosiasikan dan diimplementasikan dari tahap ke tahap, tetapi mereka ingin secara bersama-sama membuat visi bersama secara jelas. Dalam buku ini juga menjelaskan permasalahan mendasar dari krisis Semenanjung Korea yang disebabkan karena adanya perbedaan mendasar terhadap paham diantara dua negara Korea tersebut

yang pada akhirnya membuat kedua negara tersebut terus menghadapi perbedaan. Perbedaan yang terjadi diantara kedua negara Korea tersebut bermula karena adanya campur tangan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Dimana kedua negara besar tersebut berusaha menanamkan pahamnya masing-masing di kedua negara Korea tersebut.

Permasalahan tersebut semakin memanas ketika Korea Utara mulai melakukan pengembangan senjata nuklirnya pada tahun 1994. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat dan dianggap bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat dalam hal penyebaran senjata nuklir. Seiring dengan pengembangannya, permasalahan senjata nuklir tersebut yang pada akhirnya membawa Korea Utara dan Amerika Serikat menghadapi konflik terkait pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Terkait permasalahan tersebut, Korea Utara dan Amerika Serikat terus berupaya mencari jalan keluar dalam menghadapi konflik tersebut. Kedua negara pernah mencapai kerangka kesepakatan yang telah dibuat pada tahun 1994 di Jenewa. Namun, Korea Utara justru tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan terus melakukan pengembangan senjata nuklirnya.

Dibuku ini lebih menjelaskan pada permasalahan awal dari Krisis Semenanjung Korea, yang pada akhirnya justru Amerika Serikat yang berkonflik dengan Korea Utara terkait adanya pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam buku ini hanya menjelaskan sampai pada tahun 2002 mengenai upaya apa saja yang dilakukan kedua negara tersebut dalam

menghadapi interaksi konflik yang terjadi di kedua negara tersebut terkait adanya pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

- **Deborah Sanders, *U.S Naval Diplomacy in The Black Sea*, Proquest Research Library, 2007.**

Dalam jurnal "*U.S Naval Diplomacy in The Black Sea*" yang ditulis oleh Deborah Sanders menjelaskan bahwa tujuan Amerika Serikat menggunakan *Naval Diplomacy* atau yang sering disebut Gunboat Diplomacy di Laut Hitam adalah untuk mempromosikan tujuan pemerintahan di tingkat internasional. Seperti yang dikatakan oleh Kepala angkatan Laut Amerika Serikat bahwa gunboat diplomacy bukan hanya penting dalam menentukan dan memungkinkan pada saat perang, namun angkatan laut lebih penting dalam menjaga perdamaian. Gunboat diplomacy juga dikatakan bukan hanya sebagai penggunaan ancaman namun sebagai dalam rangka untuk mengamankan keuntungan atau mencegah kehilangan dalam hal sengketa internasional.

Gunboat diplomacy dianggap oleh Amerika Serikat dapat bertindak dalam mendukung sekutu, pengaruh netral, mencegah musuh yang potensial, melindungi kepentingan dan menegakkan hukum internasional. Dalam hal ini gunboat diplomacy oleh Amerika Serikat merupakan cara untuk mencapai efek yang diinginkan dan mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Namun penggunaan gunboat diplomacy Amerika Serikat di Laut Hitam memberikan dampak bagi lingkungan regionalnya. Baik itu dalam hal yang positif dan negatif seperti peningkatan hubungan militer antara Amerika Serikat dan ukraina dan memberikan dampak yang negatif bagi hubungan Rusia dengan Ukraina.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam penggunaan gunboat diplomacy adalah untuk mengamankan wilayah dari teroris dan ancaman keamanan lainnya, mempromosikan stabilitas dan demokrasi dan menjamin tidak adanya hambatan dalam arus barang dan energi, sebagai pangkalan militer, dan sinyal geostrategi terhadap Rumania dan Bulgaria. Gunboat diplomacy juga memberikan dampak pada peningkatan hubungan militer antara Rumania dan Bulgaria di wilayah tersebut. Rumania dan Bulgaria menganggap bahwa perlu adanya peningkatan keamanan dan stabilitas di wilayah Laut Hitam. Hal tersebut juga direspon oleh Rusia dengan memberikan dukungan terhadap Rumania dan Bulgaria.

Dalam jurnal ini menjelaskan dengan sangat jelas apa tujuan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam penggunaan gunboat diplomacy di Laut Hitam. Baik dalam hal tantangan dan dampak yang diakibatkan dengan adanya gelar pasukan gunboat diplomacy yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah tersebut.

- **LIM Soo-Ho, *Motives behind North Korea's Nuclear Weapons and Prospect for Denuclearization*, SERI Quarterly, Oktober 2009.**

Dalam tulisan "*Motives behind North Korea's Nuclear Weapons and Prospect for Denuclearization*" yang ditulis oleh LIM Soo-Ho menjelaskan mengenai pengakuan *de facto* bagi negara yang memiliki senjata nuklir. Dilihat dari uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korut dari tahun 2006 menjadikan Korea Utara sebagai negara yang memiliki senjata nuklir yang mana pernyataan tersebut datang dari Amerika Serikat. Berdasarkan The US National Intelligence

menyebutkan bahwa Korut sebagai negara nuklir pada November 2008. Selain itu Pasukan Komando Gabungan Amerika Serikat menyebutkan Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan nuklir di Asia bersama dengan Rusia, China, India dan Pakistan.

Melihat hal tersebut terdapat kemungkinan bagi Korea Utara untuk diakui secara resmi oleh masyarakat internasional sebagai negara senjata nuklir. Akan tetapi hal yang menjadi pertimbangan dasar tersebut adalah bahwa jika melakukan pengakuan terhadap Korea Utara sebagai negara nuklir maka akan merusak perjanjian internasional mengenai NPT dan memberikan kemungkinan bagi negara lain untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Korea Utara

Dalam tulisan ini juga menjelaskan 4 hipotesis mengenai motivasi Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir, (1) militer defensif, (2) tujuan diplomatik, (3) tujuan politik, (4) tujuan serangan militer. Bagi Korea Utara melihat senjata nuklir merupakan tidak hanya untuk mempertahankan kekuasaan, rezim dan negaranya tetapi juga untuk mengamankan sumberdaya eksternal yang diperlukan guna pembangunan ekonomi dan juga sebagai upaya dalam penyatuan hegemonik di Semenanjung Korea.

Tulisan ini juga memberikan dua opsi dalam penyelesaian masalah nuklir Korea Utara, *pertama* pencapaian terkait denuklirisasi dianggap mungkin tanpa mengganti perubahan dasar dari sifat rezim dan system di Korea Utara. *Kedua*, Korsel, Jepang dan AS diminta untuk memperkuat daya tangkal mereka terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Hal ini dianggap perlu tidak hanya untuk mencegah

provokasi militer Korut tetapi juga dianggap dapat menetralkan diplomatik Korea Utara terkait pemaksaan strategi penggunaan senjata nuklir.

Dalam jurnal ini lebih mengarah pada motif dari Korea Utara dalam melakukan pengembangan senjata nuklir. Selain itu, jurnal ini juga melihat propek bagi denuklirisasi di masa depan terkait dengan adanya pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Dari ketiga penelitian diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan fokus dengan penelitian yang penulis akan buat. Ketiga referensi diatas belum membahas mengenai gunboat diplomasi yang dilakukan Korea Utara dalam menghadapi Interaksi Konflik dengan Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir. Pada buku yang pertama lebih melihat awal mula masalah Semenanjung Korea dan berakhir pada perjanjian yang disepakati di Jenewa pada tahun 1994. Pada tulisan yang kedua menjelaskan mengenai gunboat diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Laut Hitam baik itu tujuan politik yang ingin dicapai, tantangan dan dampak yang dihasilkan dari adanya gunboat diplomasi di Laut Hitam. Pada tulisan yang terakhir lebih melihat motif Korea Utara dalam melakukan pengembangan senjata nuklir. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya buat akan menjelaskan gunboat diplomasi yang dilakukan Korea Utara dalam menghadapi interaksi konflik dengan Amerika Serikat dengan menggunakan senjata nuklir yang dimilikinya dimana fokus penelitian ini dimulai pada tahun 2006-2009.

I.6 Kerangka Pemikiran

- **Gunboat Diplomacy**

Gunboat Diplomacy merupakan sebuah diplomasi dengan menggunakan kekuatan angkatan sebagai bentuk diplomasi demonstrasi atau sebagai bentuk ancaman untuk tujuan politik yang mulai meluas dan kontroversial pada tahun 1980an. Gunboat diplomacy dianggap merupakan strategi yang paling besar dan yang paling efektif dalam mencapai tujuan suatu negara dengan penekanan pada penggunaan paksaan fisik sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Meskipun pemerintah nasional sering menerapkan strategi pengganti ataupun sebagai kombinasi dengan negosiasi.

Secara konsep yang lebih luas Robert Mandel menjelaskan bahwa gunboat diplomacy merupakan teori tawar-menawar (*bargaining*), sinyal (*signaling*) dan kekuatan (*force*).⁹ Gunboat diplomacy merupakan dimensi tawar-menawar (*bargaining*) yang akomodatif, koersif dan persuasif dan lebih mengarah pada kategori koersif. Gunboat diplomacy dijelaskan bahwa :

“Sebagai sinyal politik – militer yang dimulai dalam rangka untuk meningkatkan komitmen terhadap pencapaian kepentingan melalui kekuatan militer”¹⁰.

Selain itu, gunboat diplomacy juga merupakan Strategi dengan menggunakan kekuatan yang cepat dan menentukan strategi, strategi

⁹ Robert Mandel, “*The Effectiveness of Gunboat Diplomacy*”, *International Studies Quarterly*, Vol. 30, No.1, Maret, 1986, hal 60.

¹⁰ *Ibid.*

gesekan, strategi diplomasi koersif dan tes kemampuan dalam batasan aturan dasar dan secara prinsipal masuk kedalam strategi diplomasi koersif. Gunboat diplomacy didukung oleh teori diplomasi koersif dan teori pencegahan (*deterrence*). Menurut Robert Mandel :

*Teori diplomasi koersif mencoba untuk mengubah status quo, sementara teori pencegahan mencoba untuk mempertahankannya*¹¹.

Diplomasi koersif terjadi ketika kekuatan digunakan dalam suatu teladan, sikap demonstratif, dalam diskrit dan peningkatan yang terkontrol untuk mendorong lawan untuk merevisi perhitungannya dan saling menyetujui untuk menerima penghentian terhadap konflik. Diplomasi koersif berusaha untuk mengikis motivasi lawan dengan memanfaatkan kapasitas untuk menimbulkan kerusakan dan tergantung pada permintaan lawan dan keengganan untuk mematuhi yang berkisar dari lemah “coba dan lihat” ke pendekatan yang lebih kuat “taktik ultimatum”

Pencegahan (*deterrence*) merupakan penggunaan ancaman yang berbahaya untuk mencegah seseorang dalam melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Pencegahan (*deterrence*) dapat mengandalkan ketakutan emosional, penilaian rasional terhadap biaya dan manfaat, dan mungkin akan melibatkan keduanya baik ancaman hukuman ataupun ancaman penolakan yang digunakan sebagai sarana untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Gunboat diplomacy dapat memasukkan unsur dari keduanya yaitu diplomasi koersif dan pencegahan dalam

¹¹ *Ibid.*

situasi yang berbeda. Meskipun biasanya disertai dengan tingkat yang lebih rendah yaitu komunikasi verbal dari pada ke pendekatan yang lebih umum.

Secara lebih spesifik, konsep *gunboat diplomacy* merupakan teori dari pertunjukkan kekuatan. Pertunjukkan kekuatan terjadi ketika tindakan fisik yang dilakukan oleh satu atau lebih dari anggota militer sebagai bagian dari upaya yang disengaja oleh otoritas nasional untuk mempengaruhi atau bersiap untuk mempengaruhi perilaku individu di negara lain tanpa terlibat kedalam konteks kekerasan. Pertunjukkan kekuatan mencakup berbagai jenis kegiatan militer, termasuk gerakan publikasi kekuatan udara, latihan militer didaerah sensitif, manuver angkatan laut, mobilisasi cadangan atau pengujian rudal yang provokatif.

Tujuan dari penggunaan kekuatan termasuk mempertunjukkan salah satu kekuatan sendiri dan mengatasi musuh, menampilkan kekuatan aliansi, komunikasi ancaman secara langsung ataupun tidak langsung, mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain, menghindari perang, mencapai resolusi ketegangan, meningkatkan semangat nasional atau mendapatkan umpan balik dari reaksi negara lain.

Gunboat diplomacy secara umum sering digunakan dalam berbagai jenis pertunjukkan kekuatan. *Gunboat diplomacy* secara spesifik melibatkan penggunaan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan berkelanjutan untuk berurusan dengan ancaman yang tak terduga atau tidak ditentukan.

- **Interaksi Konflik**

Perhatian dunia kini mulai beralih dari aksi suatu negara ke interaksi dua atau lebih negara untuk saling berhubungan bukan dalam hal kebijakan luar negeri. Interaksi negara pada sistem kontemporer saat ini sangatlah banyak dan beragam. Klasifikasi interaksi tersebut dapat diambil sesuai bidang isu, seperti perdagangan, keamanan internasional, pariwisata, kerjasama teknis, pertukaran budaya, kontrol terhadap senjata nuklir dan masih banyak lagi. Selain itu, metode klasifikasi lainnya berokus pada jenis interaksi yang mendominasi dalam hubungan antara setiap pasangan negara dengan tidak mempermasalahkan dalam isu apa mereka terlibat.

Menurut K.J. Holsti konflik dijelaskan bahwa :

Konflik mengarah pada kekerasan yang terorganisir yang muncul dari kombinasi pihak tertentu, posisi yang tidak kompatibel terhadap sebuah isu, sikap bermusuhan dan beberapa jenis tindakan diplomasi dan aksi militer.¹²

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik internasional dianggap normal tetapi bukan sebuah kebutuhan pemerintah negara. Pihak-pihak berusaha untuk mencapai tujuan tertentu, seperti sebagai tambahan atau lebih mengamankan teritori atau wilayah, keamanan, kontrol terhadap sumber daya alam yang berharga, akses pasar, prestige, aliansi, revolusi dunia, penggulingan pemerintahan yang tidak ramah dan masih banyak hal lainnya. Dalam upaya

¹² K.J. Holsti, "International Politics: A Framework for Analysis : The Interaction of States : Conflict and Conflict Resolution", University of British Columbia, Prwntice Hall, Inc, 1967, hal 348.

untuk mencapai atau mempertahankan tujuan tersebut, tuntutan dan tindakan atau keduanya akan bertentangan dengan kepentingan dan tujuan pihak lain.

K.J Holsti dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen dalam konflik internasional, yaitu ¹³:

- a. Bidang masalah (*issue field*) adalah subyek perdebatan antara pihak-pihak dan termasuk posisi mereka yang berusaha untuk mencapai tujuan. Perilaku konflik (sikap dan aksi) cenderung terjadi ketika pihak A menempati posisi yang tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak B. Konflik dapat meningkat di suatu daerah karena pemerintah menginginkan penyelesaian masalah dalam sikap yang tidak kompatibel dengan harapan negara lain. Beberapa bidang isu yang dianggap tidak kompatibel seperti struktur tarif, harga minyak, proliferasi senjata nuklir, pengobatan kaum minoritas dalam sebuah negara.
- b. Ketegangan (*tensions*) merujuk pada serangkaian sikap dan kecenderungan seperti ketidakpercayaan dan kecurigaan. Ketegangan tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik tetapi hanya mempengaruhi pihak lain untuk mempekerjakan atau manifestasi perilaku konflik yang harus terus berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak kompatibel. Dengan kata lain, sifat antagonis, ketidakpercayaan, kecurigaan dan sejenisnya tidak pada kondisi yang cukup untuk terjadinya konflik dan krisis.

¹³ *Ibid*, hal 349.

c. Tindakan (*actions*) dalam konflik termasuk diplomasi, propaganda, komersial atau ancaman militer dan hukuman dimana pihak yang bersaing mengambil tindakan satu sama lain. Sehingga kita dapat membedakan isu-isu yang diciptakan dari tujuan kolektif yang tidak kompatibel, sikap para pembuat kebijakan yang mempengaruhi mereka untuk membuat ancaman dan melaksanakan hukuman dan pengambilan tindakan.

- **Senjata Nuklir (*Nuclear Weapon*)**

Persoalan mengenai senjata nuklir dan pengaruhnya terhadap keamanan internasional setelah Perang Dingin menjadi suatu masalah yang menarik dikaji kerana beberapa kontradiksi.¹⁴ *Pertama*, sukar dibantah bahwa tumbanganya Uni Soviet telah mengubah pola konstelasi politik internasional dan memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. *Kedua*, senjata nuklir merupakan suatu instrumen militer untuk mencapai tujuan politik.

Perubahan konstelasi politik internasional sebagai hasil akhir PD II menjadi titik awal penemuan serta pengembangan teknologi persenjataan nuklir yang melahirkan pemikiran strategi yang berdasarkan teknologi persenjataan nuklir tersebut. Bentuk dari teknologi persenjataan nuklir dapat dilihat melalui tragedi Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki. Namun tragedi tersebut menjadi awal perkembangan secara besar-besaran teknologi persenjataan nuklir.

¹⁴ Kusnanto Anggoro, "*Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan : Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin*", Pustaka Jaya, 1996, hal 70.

Setiap negara akan terus melakukan interaksi dengan negara lain dalam upaya pencarian power untuk bisa bertahan hidup di sistem internasional yang anarki. Strategi dibutuhkan agar setiap negara dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarki. Salah satu strategi dengan mempersenjatai diri sendiri menjadi pilihan yang sangat logis. Pertimbangan untuk mempersenjatai diri dilakukan agar kemampuan bertahan suatu negara bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dalam kaitannya mengenai hubungan antar negara, jika negara siap dengan persenjataan yang baik, maka proses dalam menjalin hubungan tersebut bisa dilakukan dengan lancar. Sejarah mencatat bahwa revolusi teknologi persenjataan membawa penemuan manusia kepada senjata yang sangat dahsyat yaitu senjata nuklir.

Senjata nuklir adalah salah satu alat pemusnah massal yang mendapatkan daya ledak (daya hancur) dari reaksi nuklir, baik reaksi fisi atau kombinasi dari fisi dan fusi. Senjata nuklir mempunyai kemampuan merusak dengan skala besar. Daya ledak senjata nuklir atau kepala nuklir mencapai 61 megaton atau sekitar 61.000.000 ton TNT.¹⁵ Dengan daya ledak sebesar itu senjata nuklir mampu menghancurkan setengah bumi ini.

Keberadaan teknologi senjata nuklir membuat hubungan antar negara menjadi berubah. Walaupun masih didalam tujuan untuk mencari power, namun dalam hal exercising power, posisi negara-negara yang memiliki senjata nuklir lebih diperhitungkan dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki. Melihat negara hidup dalam struktur yang anarki, tentunya tidak satupun otoritas yang

¹⁵ K.J. Holsti, *"Kerangka untuk Analisis politik internasional"*, edisi terjemahan: M. Tahir Azhari, Jakarta, hal 34.

melebihi kuasa negara untuk melarang negara untuk bisa mengejar, memiliki maupun mengembangkan senjata nuklir. Menurut A.R., Sutopo, negara memiliki beberapa alasan untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya: ¹⁶

- Militer
 - a. Keinginan untuk mencapai keunggulan militer terhadap musuh atau negara yang mungkin secara potensial akan menjadi musuhnya.
 - b. Untuk membangun suatu kekuatan penangkal, baik terhadap kekuatan lawan yang telah memiliki kekuatan nuklir terlebih dahulu.
 - c. Keinginan untuk lebih mandiri sehingga tidak terlalu menggantungkan diri kepada negara sekutunya.
 - d. Keinginan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi militer, sehingga tidak terlalu tergantung pada negara-negara besar dan membuka kemungkinan untuk memiliki kekuatan nuklir sendiri.

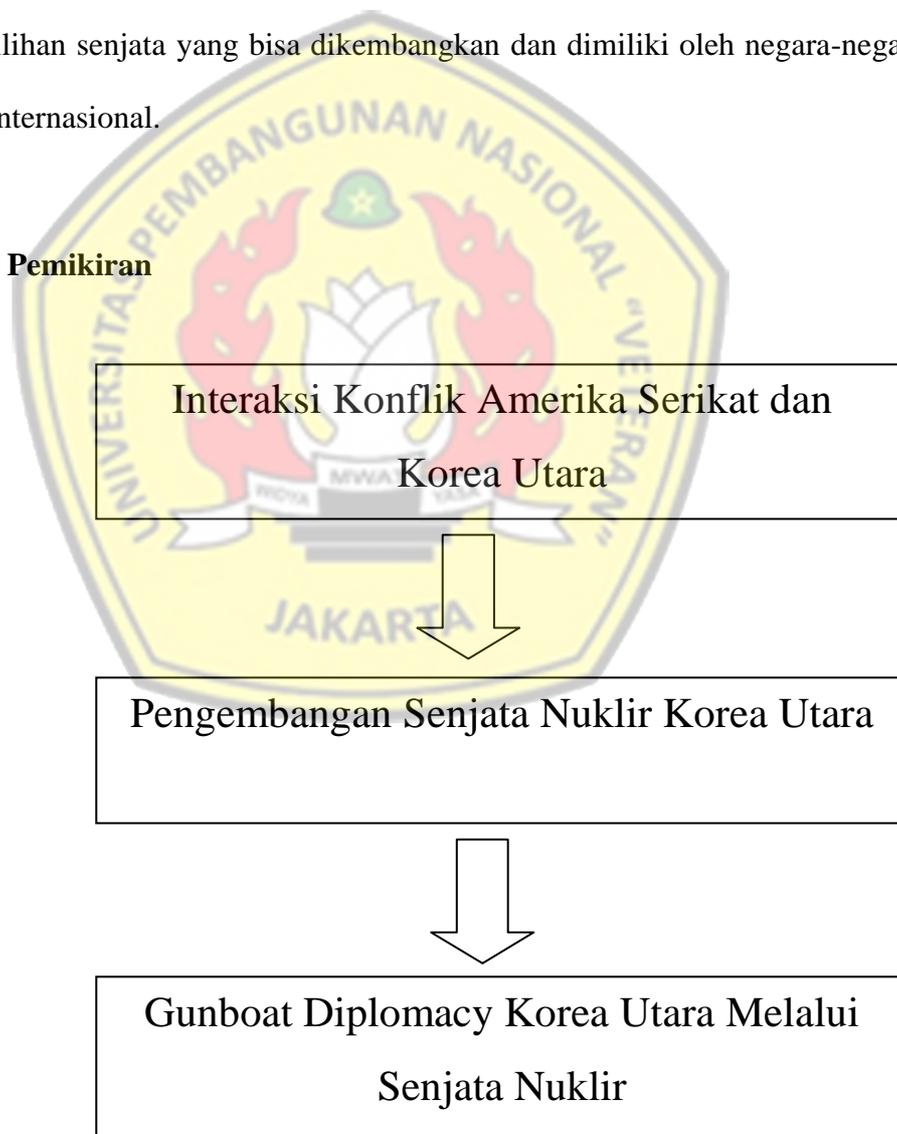
- Diplomatik dan Harga Diri
 - a. Kemampuan militer yang dimiliki oleh sebuah negara akan mempengaruhi kekuatan serta posisi tawar sebuah negara dalam melakukan diplomasi dengan negara lain.
 - b. Dengan kemampuan nuklir yang dimiliki akan menambah wibawa negara tersebut baik ditingkat kawasan maupun internasional.

¹⁶ A.A. Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro, "Memahami Kajian Strategis", FISIP UPNVJ, 2012, hal 192.

- c. Kemampuan sebuah negara untuk mengembangkan teknologi nuklirnya digunakan sebagai isyarat terhadap lawan bahwa jika diinginkan maka teknologi nuklir tersebut bisa dialihkan menjadi program persenjataan nuklir.

Pada satu titik, keinginan negara untuk selalu meningkatkan kemampuan persenjataannya akan semakin tinggi. Senjata nuklir hanya satu dari sekian banyak pilihan senjata yang bisa dikembangkan dan dimiliki oleh negara-negara didunia. internasional.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Asumsi yang mendasar dalam pembahasan penelitian ini adalah :

- a. Interaksi konflik yang terus terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara dianggap sebagai sebuah ancaman atas terjadinya krisis terhadap dua negara tersebut.
- b. Dalam menghadapi interaksi konflik dengan Amerika Serikat, Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir.
- c. Uji coba senjata nuklir Korea Utara digunakan oleh Korea Utara sebagai gunboat diplomacy dalam menghadapi interaksi konflik dengan Amerika Serikat.

I.9 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui interaksi konflik yang terjadi diantara Korea Utara dengan Amerika Serikat dan penggunaan gunboat diplomacy yang dilakukan oleh Korea Utara dalam menghadapi interaksi konflik tersebut pada periode 2006-2008. Maka metode penulisan ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bersifat mendeskripsikan kenyataan atau fakta sesuai data yang diperoleh dan memberikan makna pada permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari berupa pernyataan,

press release dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Sementara data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal ilmiah, laporan tertulis, media massa, artikel serta situs internet. Setelah data-data sudah terkumpul melalui seleksi dan pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan dapat diartikan secara jelas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.



I.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KONFLIK AMERIKA SERIKAT DAN KOREA UTARA

Bab ini akan membahas mengenai isu yang menjadi perdebatan antara Korea Utara dan Amerika Serikat yaitu pengembangan senjata nuklir Korut baik untuk militer ataupun peningkatan harga diri, uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan respon Korea Utara terhadap konflik yang terjadi dengan Amerika Serikat.

BAB III GUNBOAT DIPLOMACY KOREA UTARA MELALUI SENJATA NUKLIR

Bab ini akan membahas mengenai upaya peningkatan posisi tawar dan kekuatan militer Korea Utara terhadap Amerika Serikat dan gunboat diplomacy Korea Utara melalui diplomasi koersif dengan penggunaan senjata nuklir yang dimilikinya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA